

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional
Jl. Mayjen Sutoyo-Cililitan Jakarta Timur

Sumber : <i>KOMPAS</i>	Hari/Tgl : <i>Kamis, 13 Januari 2022</i>	Hlm/Kol : <i>6/2-5</i>
Subjek : <i>Demokrasi</i>	Bidang : <i>PK</i> <i>Tata Negara</i>	

Catatan Pinggir soal Soedjatmoko

Fachry Ali

Salah Satu Pendiri Lembaga Studi dan Pengembangan Etika Usaha (LSPEU Indonesia)

Bulan Januari ini, pemikir utama Indonesia, Soedjatmoko, genap berusia 100 tahun.

Pemikiran tokoh yang lahir 1922 (wafat: 1990) ini merembes jauh ke dalam wacana pembangunan global. Dalam komentar atas buku Soedjatmoko, *Development and Freedom* (1980), Anne Elizabeth Murase dari Sophia University menyatakan pemikiran Soedjatmoko merupakan desakan (kepada aktor-aktor global) untuk "rethinking the development process and for a morale commitment to support the yet unrealized ideal of development in freedom".

Freedom (kebebasan) adalah jantung keprihatinan Soedjatmoko sepanjang hidupnya. Untuk itu, perlu ada catatan tentang tokoh ini walau bersifat "pinggiran". Mengapa "pinggiran"? Karena "catatan utama" tentang Soedjatmoko telah ditulis oleh Ignas Kleden (dalam buku Soedjatmoko, *Etika Pembebasan*, [1984]), dengan sangat komprehensif.

Dr Zhivago dan ide kebebasan

Untuk memulainya, dengan sengaja saya membaca tulisan Soedjatmoko atas Dr Zhivago. Tulisan berjudul "Dr Zhivago: Manusia di Tengah Revolusi" ini menarik dalam dua hal. Pertama, pada kualitas tulisannya. Dengan "dingin", Soedjatmoko melihat novel karya Boris Pasternak itu sebagai sebuah lukisan tentang Revolusi Rusia (1917) yang bertransformasi sebagai "banjir mahabesar" yang membuat wilayah pinggiran turut tergenang secara tak terelakkan.

Dalam situasi semacam ini, manusia bagaikan debu, terombang-ambing tanpa mampu membuat perencanaan tentang diri dan nasibnya. Lukisan Soedjatmoko ini mempermudah memahami inti gagasan Pasternak.

Ketika abad berganti, walau pasti tak pernah membaca tulisan Soedjatmoko ini, Tony Brenton, penyunting buku *Historically Inevitable: Turning Point of the Russian Revolution* (2016), "mengulang" lukisan Revolusi Rusia sebagai "banjir mahabesar" tersebut: "Revolusi itu mengenakan kekuasaan totalitarian ajaran komunis yang akhirnya memerintah sepertiga umat manusia, mendorong munculnya Naziisme pada 1930-an, dan karena itu (juga) Perang Dunia Kedua, dan menciptakan penentang Barat selama empat puluh tahun perimbangan teror Perang Dingin.

Sulit menemukan contoh lain di mana kejadian-kejadian hanya di dalam beberapa tahun, terpusat di dalam sebuah negara, dan sebagian besar di sebuah kota, mempunyai akibat-akibat sejarah besar semacam itu".

Jika kita lihat lebih jauh, terutama setelah periode yang disebut sejarawan EH Carr dalam *The Bolshevik Revolution* (1966 [1953]), sebagai *the year of isolation and diplomatic feelers* (tahun isolasi dan diplomasi usul perdamaian), "banjir besar" Revolusi Rusia itu mengalir ke Eropa dan Asia. Tanpa saling "berkoordinasi", Soedjatmoko, Brenton, dan Carr mengungkapkan lukisan yang sama.

Kedua, untuk suatu alasan, saya terkesan dengan "kesimpulan" Soedjatmoko atas *Doctor Zhivago* ini. Di sini, ia menulis: "Dr Zhivago sebenarnya mengandung peringatan bagi umat manusia seluruhnya. Ia memperingatkannya, bahwa kehidupan manusia tak dapat dicukupi oleh politik dan filsafat politik saja. Tidak peduli politik apa dan filsafat mana. Hidup itu senantiasa terelakkan dari perangkap akal manusia".

Lalu, Soedjatmoko melanjutkan: "Sebab, filsafat politik bersandarkan pada pengertian tentang hidup, dan ia bukan hidup itu sendiri. Maka apabila, berdasarkan suatu filsafat politik kita, dari atas, hendak pengatur kehidupan manusia dalam keseluruhannya, atau ji-

kalau dalam kita berpolitik, kita mengklaim memiliki kebenaran yang mutlak, kita sebenarnya telah menjalankan suatu keangkuhan terhadap hidup itu sendiri. Pesan Dr Zhivago ialah sebaliknya, yaitu yang dapat disebut dengan suatu istilah yang tidak dipakai Pasternak sendiri: *humility of the mind*, akal yang berendah hati".

Ini menarik. Terutama karena Soedjatmoko melanjutkan uraian kesimpulannya dengan mengutip sebuah frasa dalam naskah novel *Doctor Zhivago: coddling man, exalting him above the rest of nature and worshiping him* (mengagung-agungkan manusia, membesarkannya di atas semua alam dan memujanya). Frasa ini mengingatkan saya pada makalah saya tentang Mohammad Natsir, "Menolak Menjadi Heidegger: Pemikiran Politik dan Demokrasi Mohammad Natsir" (2008) di mana saya lukiskan sikap Natsir yang "curiga" terhadap pemujaan orang besar.

Mengikuti karya Herbert Feith, *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia* (1962), kita tahu sejak 1957, politik Indonesia telah ditandai oleh menguatnya kaum *solidarity makers* atas kaum *administrators*. Kaum *solidarity makers* ini, dalam definisi Feith, adalah "para pemimpin yang terampil sebagai penghubung antarberbagai kelompok dengan tingkat modernitas dan efektivitas politik yang berbeda-beda, sebagai penghimpun massa, dan sebagai pembentuk simbol-simbol integratif".

Berbeda dengan kaum *administrators* yang disebut Feith sebagai "para pemimpin dengan keterampilan pemerintahan, teknikal, legal, dan bahasa asing yang dibutuhkan untuk menjalankan aparat modern yang sangat khusus dari sebuah negara modern, kaum *solidarity makers* menyingkirkan sikap sabar menjalani prosedur demokrasi konstitusional. Ketidakstabilan politik dan 'perpecahan' ideologis selama periode demokrasi konstitusional yang diterapkan

sejak akhir 1945 telah menimbulkan kesan bahwa demokrasi bukanlah jalan terbaik bagi sistem politik Indonesia”.

Dalam situasi inilah “orang besar” harus tampil untuk mengintegrasikan seluruh kekuatan politik dan ideologis demi “keselamatan” nasional. “Orang besar” itu adalah Soekarno, yang menggunakan frasa John Legge dalam *Su-karno: A Political Biography* (1972), *representing a new order of power* (mewakili kekuasaan tatanan baru).

Dan dalam tatanan baru itu, Soekarno muncul sebagai *fulcrum* (titik tumpu) proses integrasi kekuasaan yang sebelumnya, di bawah sistem demokrasi konstitusional, dipersepsikan terpecah-pecah itu. Dan kita tahu, “puncak” aksi penataan baru sistem politik yang telah berlangsung sejak lahirnya “Konsep-sipi Presiden” pada 1957 ini adalah Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959: pembubaran Konstituante dan pengembalian ~~UU~~ *terpilih* ~~formasi~~ *semula* yang dikukuhkan pada 18 Agustus 1945.

Dalam format konstitusi ini, presiden memegang kekuasaan besar. Dan dalam keadaan di mana kekuatan partai-partai politik mengalami kemunduran drastis, secara otomatis Presiden Soekarno tampil sebagai kekuatan yang tak tertandingi, baik menurut ketentuan konstitusi maupun *real politics*.

Dalam periode inilah Soedjatmoko menulis tinjauan novel *Doctor Zhivago*. Saya kira, usaha Soedjatmoko mengutip frasa *coddling man, exalting him above the rest of nature and worshipping him* dari novel *Doctor Zhivago* bertujuan ganda, yaitu selain menggambarkan keadaan riil yang terjadi di Rusia pasca-Revolusi 1917, juga mengungkapkan kekhawatiran akan apa yang terjadi di Indonesia ketika ia menulis tinjauan novel tersebut.

Pembangunan dan ide kebebasan

Puluhan tahun kemudian, yakni pada 1979, Soedjatmoko tetap memelihara kekhawatiran yang sama. Dalam sebuah ceramahnya di Tokyo, yang terbit dalam bentuk buku berjudul *Development and Freedom*, Soedjatmoko mengungkapkan kekhawatiran ini dengan mengatakan, “*Human freedom is certainly the first victim of such a future*” (Kebebasan manusia tentunya merupakan korban pertama dari masa depan yang semacam itu).” Di sini, perspektifnya atas novel *Doctor Zhivago* berlanjut.

Hanya saja, kekhawatiran Soedjatmoko itu kini tertuju kepada efek pembangunan yang secara struktural “mengharuskan” adanya konsentrasi kekuasaan. Ini berkaitan dengan laporan Bank Dunia yang dibuat pada 1978 yang mengungkapkan bahwa program pemberantasan kemiskinan mutlak (*absolute poverty*) tak akan tercapai pada tahun 2000 kendatipun telah dicanangkan PBB.

Keyakinan Bank Dunia itu mendorong Soedjatmoko berkata, “Laporan itu juga memperlihatkan bahwa prospek suram ini bertahan, terlepas dari pola pertumbuhan yang dipakai, yaitu terlepas dari jenis model pertumbuhan apa pun atau model-model pemerataan bagi pembangunan. Jika proyeksi ini benar, dan dengan mengingat kemiskinan, buta huruf, dan pengangguran yang meluas dalam penduduk dunia ini, apakah ada prospek bagi kebebasan manusia yang bermakna?”

Ini, pada esensinya mengungkap kekhawatiran akan kekuasaan otoriter yang secara struktural “terpaksa” muncul demi usaha melenyapkan kemiskinan. “Seluruh skenario untuk hidup di dalam dunia yang penuh sesak, lapar dan bersaing yang semacam itu,” tulis Soedjatmoko, “memperlihatkan bertambahnya tekanan-tekanan ke arah otoritarian dan penindasan yang lebih besar, persaingan yang lebih tajam, dan konflik atas sumber daya langka dan meningkatnya kekerasan, baik antarnegara maupun di dalam negara itu sendiri.”

Soedjatmoko lalu menutup paragraf di atas dengan mengatakan bahwa kebebasan manusia jadi korban pertama dalam situasi kehidupan semacam itu.

Di sini kita melihat bahwa sumber ancaman terhadap kebebasan dan otonomi manusia bagi Soedjatmoko tak bersifat tunggal. Di dalam lukisan tentang novel *Doctor Zhivago*, ancaman tersebut berasal dari ekspresi politik revolusioner. Dan di dalam “politik pembangunan”, ancaman tersebut datang atau berasal dari keharusan struktural terbentuknya kekuasaan kuat dan terpusat yang diasumsikan perlu guna memberantas kemiskinan.

Teori pembangunan

Inilah dilema “abadi” umat manusia dalam mempertahankan kebebasan. Sebab, terutama di negara-negara berkembang, di mana penguasa harus tunduk pada siklus kekuasaan berjangka pendek, gagasan pembangunan yang diajukan penganut Neo-Keynesian dengan metode *big push* (dorongan besar) jauh lebih “menggoda”.

Sebagaimana disampaikan Dorodjatun Kuntjoro-Jakti dalam disertasinya, “*The Political-Economy of Development: The Case of Indonesia Under the New Order Government, 1966-1978*” (1980), di masyarakat yang terbelakang secara ekonomi, sosial, dan pendidikan, kaum Neo-Keynesian berpendapat, “hanya dengan *a frontal attack of massive capital formation* (pembombardiran langsung pembentukan modal besar-besaran), terobosan yang menentukan dapat terjadi, yang melahirkan momentum fase ‘tinggal landas’ dan mengarah kepada ekonomi yang tumbuh berkelanjutan dengan kekuatan sendiri.”

Jalan ini melahirkan efek politik-ekonomi tertentu. Pertama, seperti kita lihat di mana pun di negeri berkembang, banjir modal telah menggenangi wilayah terpencil sekalipun dengan menyinkronkan kalangan tak mampu. Kedua, mengikuti Karl Wittfogel dalam *Oriental Despotism* (1980 [1950]), pengorganisasian usaha besar semacam ini secara struktural mendorong pemusatan kekuasaan yang, karena itu, mengancam kebebasan. Sebuah dilema manusia, seperti dinyatakan di atas, “abadi”.

Akan tetapi, Soedjatmoko berusaha memecahkannya dengan menjagokan *democratic theory of development* (teori pembangunan berdasarkan demokrasi), yaitu sebuah “teori tentang jenis-jenis pembangunan dan perlintasan-perlintasannya yang mendukung, dan bukan bersifat menghancurkan kebebasan dan kedigdayaan manusia”.

Pada konteks operasional, *democratic theory of development* ini mengingatkan kita pada kritik Karl Polanyi pada praktik “ekonomi pasar” yang cenderung melahirkan *fictitious commodities* (komoditas palsu). Dalam karyanya, *The Great Transformation* (1942), Polanyi menyatakan efek destruktif ekonomi pasar terjadi karena memasukkan “tanah” dan “manusia” sebagai komoditas yang diperjualbelikan. Inilah pangkal, kata Polanyi, lahirnya ketidakadilan material, karena baik “tanah” maupun “manusia” adalah ciptaan Tuhan. Ketimpangan yang dilahirkannya inilah, di dalam perspektif Soedjatmoko, melahirkan efek *undemocratic development*.

Tentu, penerapan *democratic theory of development* ini tampak muskil. Kendatipun demikian, sejak 1980-an, bahkan di Indonesia telah tersebar gagasan pembangunan alternatif berbasis lembaga swadaya masyarakat.

Dan pada tingkat pemikiran global, karena serangan terhadap *Europe-biased development strategy* semakin gencar, telah diperkenalkan gagasan *people-centered development*, seperti dinyatakan Ismid Hadad dalam diskusi tentang Soedjatmoko di LP3ES, 10 Januari 2022. Kelak, di samping gagasan-gagasan lain yang kian berkembang, kita menemukan frasa *it is a shareholders' world*. Sebagaimana diajarkan Thomas Widlock dalam *An Anthropology and the Economy of Sharing* (2016), frasa tersebut mengarah kepada *a self-image of the shareholder society* justru di dalam masyarakat kapitalis itu sendiri.

Di sini, kita melihat *democratic theory of development* Soedjatmoko tidak hanya terus bergaung, tetapi menyambung ke belakang kepada, setidaknya, Karl Polanyi, dan ke depan, kepada antropolog ekonomi Thomas Widlock. Dalam seratus tahun kelahirannya, Soedjatmoko, pemikir Indonesia terkemuka ini, telah melahirkan satu titik pemikiran dari rantai panjang wacana pembangunan global tentang kebebasan manusia.